

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PASAL 4  
AYAT 2 PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) WANITA MENJADI ISTRI  
KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT**

**SKRIPSI**

**Oleh  
ACHMAD SYARIFUDIN  
NIM. C01212005**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Syarifudin  
NIM : C01212005  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP  
PASAL 4 AYAT 2 PP NO. 45 TAHUN 1990  
LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
WANITA MENJADI ISTRI KEDUA KETIGA DAN  
KEEMPAT

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Oktober 2018



Achmad Syarifudin

C01212005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Syarifudin NIM C01212005 ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 14 Januari 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical strokes and a long horizontal flourish extending to the right.

Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA

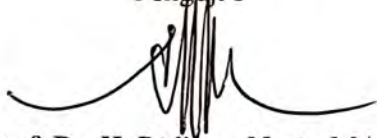
NIP. 195008171981031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Syarifudin NIM. C01212005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Kamis 7 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



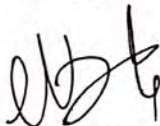
Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA  
NIP. 195008171981031002

Penguji II



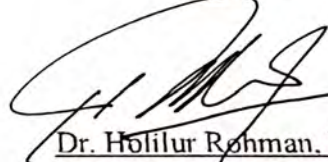
H. Abu Dzarrin Al Hamidy, MAg  
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Nabiela Naili, S.S., M.HI  
NIP. 198102262005012003

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, M.HI  
NIP. 19870022015031005

Surabaya, 15 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD SYARIFUDIN  
NIM : C01212005  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PERDATA ISLAM  
E-mail address : [gussyarif94@gmail.com](mailto:gussyarif94@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PP NO. 45 TAHUN

1990 TENTANG LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) WANITA MENJADI

ISTRI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2019

Penulis

(ACHMAD SYARIFUDIN)

*nama terang dan tanda tangan*



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II      TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN KONSEP ISTRI POLIGAMI (Istri Kedua Ketiga dan Keempat)</b>	
A. MASLAHAH MURSALAH	
1. kedudukan dan Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	23
2. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	27
3. Setatus Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	30
4. Pendapat ulama' <i>Maslahhah Mursalah</i> .....	32
B. KONSEP POLIGAMI	
1. Pengertian Poligami .....	37
2. Dasar Hukum Poligami.....	39
3. Syarat-Syarat Poligami .....	45

A.	Konsep Kedudukan Setatus Pegawai Negeri Sipil .....	49
B.	Ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Larangan Bagi PNS Wanita untuk Menjadikan Istri Kedua Ketiga dan Keempat .....	56
C.	Ketentuan Sanksi Bagi PNS Sesuai PP No. 45 Tahun 1990..	60

A.	Analisis Ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 tentang larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri Kedua Ketiga dan Keempat .....	67
B.	Analisis Masalah Mursalah Terhadap PP No.45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Larangan Bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat .....	78

A.	Kesimpulan .....	91
B.	Saran .....	92

## LAMPIRAN



## BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan laki-laki dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi, hal ini terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Suatu akad atau transaksi sebaiknya yang melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat.<sup>1</sup>

Tidak salah jika didefinisikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara yaitu laki-laki dan wanita yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2007), 14.

membentuk keluarga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. *Al-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diartikan sebagai perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan dalam pasal 3 UUP No. 1 Tahun 1974 adalah:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 406.

<sup>3</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkala), 5.

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Ibid., 85.

<sup>6</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat, Kajian Fikh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 351.

<sup>7</sup>Ibid., 352.

[illegible]

Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami itu berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya poligami telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

<sup>10</sup>A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponogoro :STAIN Ponogoro Press Cet. Pertama, 2009),16.

1990 Tentang Izin Pernikahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang diperbarui menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hukum pernikahan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur, terutama yang diatur dalam UUP dan peraturan pelaksanaannya serta kompilasi hukum Islam. Beberapa peraturan pelaksanaan yang terikat dengan poligami, seperti PP No.10 Tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang sekarang diperbarui menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum pernikahan diindonesia adalah Azas monogami, yaitu satu suami satu orang istri.<sup>11</sup> Azas tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Al-Nisa': 3.<sup>12</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ

وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 6.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 77.



Ulama' kontemporer seperti quraish shihab, memiliki pemahaman yang berbeda dalam menafsiri surat an Nissa' ayat 3 tersebut. Beliau menyatakan bahwa ayat tersebut tidak mengandung perintah untuk berpoligami, tetapi perintah untuk tidak berbuat dzolim pada anak yatim, Sedangkan perintah

<sup>14</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 335.

Aturan hukum di Indonesia memungkinkan juga dilakukannya poligami oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aturan tersebut terdapat pada PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan pegawai negeri sipil. Hasil dari Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 1983 diubah pada PP No.45 Tahun 1990 tentang izin pernikahan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil dari perubahan ketentuan pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama kedudukan sebagai istri kedua ketiga dan keempat dilarang menjadi pegawai negeri sipil.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

<sup>15</sup> Quraish shihab, *tafsir al- misbah, pesan, kesan dan keserasian al qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 321.

Sebelum berlakunya PP tersebut wanita ASN boleh dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat dari Laki-Laki bukan ASN. Kemudian PP No. 10 Tahun 1983 direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990 dengan melarang ASN wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat baik oleh Laki-Laki ASN maupun bukan ASN. Dalam pelaksanaannya beberapa ketentuan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10



Dari sini dapat kita ketahui PP No. 45 Pasal 4 ayat 2 tentang larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi istri kedua ketiga dan keempat, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang telah terpaparkan sebelumnya.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- <sup>19</sup>Ibid.



Dengan adanya suatu identifikasi masalah diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

- a. Ketetapan pada pasal 4 ayat 2 PP NO 1990 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita mengapa dilarang menjadikan istri kedua ketiga dan keempat.
- b. Kemaslahatan pada pasal 4 ayat 2 PP NO 1990 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita dilarang menjadikan istri kedua ketiga dan keempat untuk ditinjau dengan hukum islam teori *masalah mursalah*.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

1. Sekripsi yang ditulis oleh Vannesia Jeanet Wodi (2013) NIM: B 11108880 Universitas Hasannudin Makasar, dalam sekripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi

<sup>21</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.



Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kebijakan 4 ayat 2 PP. No. 45 tahun 1990 tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat.
2. Analisis hukum islam dengan teori *Maslahah Mursalah* terhadap kebijakan pasal 4 ayat 2 PP. NO. 45 tahun 1990 tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat.

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

[illegible]

Sebagai penambah wawasan dalam praktik poligami khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa peraturan pemerintah (PP) tentang larangan menjadikan istri kedua ketiga dan keempat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 4 NO. 45 Tahun 1990, dan bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan pengetahuan tentang peraturan pemerintah :

- [illegible]



## H. Metode Penelitian

Maslahah mursalah : Suatu metode ijtihad dalam menggali hukum terhadap setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. adapun Tujuan utama *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 : Peraturan ini mengatur tentang izin pernikahan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 4 ayat 2 Menjelaskan tentang Larangan Menjadikan Istri Kedua Ketiga dan Keempat (Istri Poligami).

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan

penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>25</sup>

Metode Penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.<sup>26</sup>

Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun data yang digali :

## 1. Jenis Penelitian

Jenis data yang diteliti dan diperlukan oleh penulis ialah referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang teori hukum islam masalah mursalah, khususnya terkait pembahasan larangan menjadikan istri kedua ketiga dan keempat menurut teori masalah mursalah dikalangan pegawai negeri sipil. Data yang paling pokok yang harus didapat ialah problematika dan konsep dari masalah mursalah sehingga penelitian nantinya bisa fokus dan terarah.

Selain mencari data masalah mursalah peneliti juga mencari dokumen – dokumen peraturan pemerintah (PP) NO. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 serta latar belakang, dan dampak positif dan negatifnya,

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

<sup>26</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 05.

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri atas :

Sumber data primer adalah sumber pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang digunakan adalah Instruksi Presiden (Inpres) berupa Undang - Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, setra PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sumber sekunder adalah sumber yang dibutuhkan untuk mendukung/melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain :

- [illegible]

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.<sup>27</sup> Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>28</sup> Data yang akan diteliti PP No 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 tentang larangan menjadikan istri kedua ketiga dan keempat, sehingga peneliti merujuk beberapa kitab ushul fikih dan fikih menurut empat mazhab yang menjadi rujukan ilmu fikih untuk menjawab kasus-kasus kontemporer. Selain itu, peneliti juga tetap merujuk terhadap nash-nash yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadist sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.

<sup>28</sup> Ibid., 33.

Setelah data terkumpul, maka hal yang harus dilakukan adalah proses editing (pemeriksaan data) yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.<sup>29</sup>Data diperiksa dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan antara beberapa referensi hukum berikut dengan literatur tambahan yang lain.

Kemudian, setelah editing selesai, dilanjutkan dengan proses organizing yang berarti menyusun data yang diperoleh secara sistematis.<sup>30</sup> Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat jelas tentang hasil dari analisis Hukum Islam terhadap Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan hukum.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data ialah menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur hukum Islam yang berkaitan dengan Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 118.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 803



Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori hukum Islam dengan menggunakan masalah mursalah untuk menganalisis problematika Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat secara lebih mendalam.<sup>31</sup>

Sistematika pembahasan ialah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi *masalah mursalah* meliputi pengertian poligami, kedudukan *masalah mursalah*, status hukum *masalah mursalah*, Pendapat para ulama'. Konsep Poligami meliputi pengertian poligami, Dasar hukum poligami, Syarat-syarat poligami.

[illegible]

Bab ketiga berisi data penelitian tentang pengertian dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil, dan penjelasan mengenai kebijakan pasal 4 ayat 2 PP. NO. 45 tahun 1990 tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat serta sanksi.

Bab keempat berisi analisis yang merupakan hasil dari penelitian yang penulis sajikan dalam karya tulis ini, yang di dalamnya dijelaskan dan diungkapkan secara tuntas bagaimana analisis *masalah mursalah* mengenai kebijakan pemerintah pasal 4 ayat 2 PP. NO. 45 tahun 1990 tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat, serta aplikasinya dan konsekuensi terhadap adanya peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 PP. NO. 45 tahun 1990 yang akan kita analisis perspektif hukum islam teori *masalah mursalah* secara mendalam.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.

## BAB II

## KONSEPMASLAHAH MURSALAH DAN KONSEP ISTRI POLIGAMI

## DALAM ISLAM

### A. Masalah Mursalah

## 1. Kedudukan dan pengertian *Maslahah Mursalah*

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *masalah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat masalah itu sendiri. Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi.

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi 3 macam yaitu:<sup>30</sup>

- 1) *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat. Seperti: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Maslahah al-Hajiyyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- 3) *Maslahah al-Tahthiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327.

- Dari berbagai pembagian *masalahah* di atas, penelitian ini memfokuskan bahasan tentang *masalahah mursalah*. Secara etimologis *masalahah mursalah*

[illegible]

Maslahah berasal dari kata **الح** dengan penambahan, alif diawalnya yang secara arti kata berarti, baik lawan kata dari, buruk atau, rusak adalah masdar dengan kata *shalah* yaitu, manfaat atau, terlepas dari padanya kerusakan.<sup>33</sup>

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti *masalah mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara',

<sup>34</sup>Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269.

Menurut ahli ushul fiqh, *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *masalah mursalah* adalah suatu metode ijtihad dalam menggali hukum terhadap

<sup>37</sup>Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.



setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

## 2. Syarat Syarat *Maslahah Mursalah*

Adapun mengenai persyaratan untuk membuat dalil *masalah mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :<sup>38</sup>

- a. Hendaknya *masalah mursalah* bisa diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan muhadarat dari manusia secara utuh.
- b. Hendaknya *masalah mursalah* yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.
- d. Hendaknya bisa diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan diatas terlihat bahwa ulama' yang menggunakan *masalah mursalah* dalam berijtihad cukup hati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama' ini adalah keberanian menetapkan dalam hal hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II...*,360

## Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *masalah mursalah*

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, jika tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuhinya.<sup>40</sup>

a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *masalah mursalah*. Sementara *masalah*

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul.*, 130.



Adapun Menurut para ulama usul fiqh, sebagian ulama mengistilakan *masalah mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu

<sup>44</sup>Ibid., 145.

- a. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *masalah mursalah*.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan istilah (menggali dan menetapkan suatu masalah).<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Rachmat Syafe'i, *IlmuUshul.*, 118.

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori *Maslahah Mursalah* bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 191.<sup>47</sup>

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka."<sup>48</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait *masalah mursalah*. Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum,

<sup>48</sup>Ibid.,.





- Perselisihan pendapat tentang kehujjahan *masalah al-mursalah* yang  
ikan sumber hukum oleh kalangan para ulama memicu perhatian para ulama

[illegible]

1. *Al-Qadi* dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan *masalah mursalah* menjadi sumber hukum Islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
2. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya menjadi sumber hukum Islam secara mutlak.
3. Imam Asy-Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyyah memakai *masalah mursalah* dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang sahih. Hal ini senada dengan pendapat Al-Juwaini.
4. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap tahsin atau tazayyun (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila neraca pada martabat penting maka boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Beliau pun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan, yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-Mustashfa*, Imam Ghazali menolak *masalah mursalah*, namun dalam kitab *Syifa'u al-Ghalil*, Imam Ghazali menerimanya. (*Al-Mustashfa* I : 141).<sup>52</sup>

Selain istilah ushul fiqh, istilah lain yang harus dipahami adalah istilah qawaid al-fiqhiyyah. Istilah qawaid al-fiqhiyyah dalam pemahaman Ahmad

<sup>51</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad At-Tilmisani, *Miftah Al-Wusul* (Beirut: Muassasah Alrayyan, 2003).

<sup>52</sup> Muhammad Bin Muhammad Al- Ghozali, Al- Mustashfa, juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013), 317.

<sup>55</sup> Ach. Fajruriddin Fatwa, *UsulFiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya kepada kaidah “Jalb al-Masalih dar’u” (mendatangkan segala kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung “dar’u al-mafasid” (menolak segala kerusakan).<sup>56</sup>

## B. Konsep Poligami

## 1. Pengertian poligami

Kata poligami terdiri dari dua kata, yaitu “poly” dan “gami”. Secara etimologi, poly artinya “banyak”, gami artinya “isteri”. Jadi polygami artinya beristri banyak, sedangkan secara terminologi, polygami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak 4 orang.<sup>57</sup>

Sedangkan pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah: sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu bersamaan.<sup>58</sup> Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini, yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan, sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>59</sup> Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah

<sup>56</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah...*, 147.

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006, cet. 2), 129.

<sup>58</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat, Kajian Fikh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 351.

<sup>59</sup>Ibid..., 352.

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.<sup>61</sup>

Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami itu berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.<sup>62</sup>

Allah Swt. membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti

<sup>61</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

[illegible]



خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

[illegible]

kepada mereka dan memberikan mas kawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.<sup>63</sup>

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.<sup>64</sup>

Selain syarat-syarat tersebut di atas, adil adalah salah satu prioritas utama dalam melakukan poligami, adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Keadilan yang dijadikan prasyarat perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri-istri yang lain.<sup>65</sup>

Pada waktu itu memang islam mengalami kekacauan dimana poligami tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Ketika Islam datang para lelaki kabilah tsaqif banyak yang memiliki 10 orang istri, mereka adalah: Mas'ud Bin Mu'tib, Mas'ud Bin Amr Bin 'Umar, Urwah Bin Mas'ud, Sufyan Bin Abdullah, Ghailan Bin Salamah, dan Abu 'Aqil Mas'ud Bin 'Amir Bin Mu'tib. Lalu Islam membatasinya hanya empat istri saja, sehingga ketika masuk Islam dan syariat poligami di turunkan, Ghailan, Sufyan, dan Abu 'Aqil memilih empat

<sup>63</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 335.

<sup>64</sup>Ibid., 335.

<sup>65</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.,179.

orang istri mereka dan menceraikan 6 yang lain. Sedangkan Urwah masuk Islam lalu wafat sebelum syariat poligami diturunkan.<sup>66</sup>

Dalil yang disyariatkan poligami berasal dari Al-Qur'an, sunah Rosullah SAW dan ijma' ayat Al-Qur'annya itu ialah firman Allah SWT:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

Menurut ikrimah dalam kitab tafsirul Munir juz 1 hal-139 mengenai ayat tersebut menjelaskan bahwa dulu ada seorang suami yang memiliki beberapa istri dan budak, dan kewajiban suami harus memberi nafkah kepada semua istri-istrinya beserta budaknya, sehingga harta si suami tersebut habis, dan sang suami terus membutuhkannya untuk memeberi nafaqoh kepada para istrinya beserta para budaknya, sehingga rosullah mengetahui hal tersebut kemudian Rasulullah mengatakan pada seseorang yang memiliki beberapa istri tersebut, janganlah engkau menikahi lebih dari empat istri karena terdahulu memang seorang suami bisa menikahi lebih dari empat bahkan bisa memiliki delapan istri seperti Iis bin Aris yang memiliki delapan istri kemudian Allah melarang menikahi lebih dari empat.<sup>67</sup>

Jika kamu menanyakan ayat tersebut cukup membolehkan seorang laki-laki beristri dua, tiga atau empat, lalu apa maksud ungkapan jamak pada kata *matṣnaa* (dua-dua), *tlulaatṣa* (tiga-tiga), dan *rubaa'* (empatempat) ? Maka jawaban penulis adalah, bahwa ayat tersebut ditujukan untuk orang banyak,

<sup>66</sup>Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, diterjemahkan oleh. Ahmad Sahal Hasan (Yordania: Daar An-Nafaais, 2002), 27.

<sup>67</sup> *Tafsirul Munir juz 1* (al haromain jaya indonesia), 139.

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِشْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَاءَ رَهْنٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدِيثَ غِيلَانَ

Hadits kedua riwayat Ghailan Bin Salamah Ats-Tsaqifi masuk Islam dalam keadaan beristri sepuluh orang yang ia nikahi di masa jahiliah (sebelum masuk Islam), mereka semua masuk Islam bersamanya, maka Rasulullah saw memerintahkannya untuk memilih empat diantara mereka.<sup>69</sup>

Sedangkan dalil dari ijma' ialah kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik melalui ucapan maupun perbuatan mereka sejak masa Rasulullah SAW sampai hari ini. Para sahabat utama nabi melakukan poligami seperti Umar bin Khatab, Ali Abi Thalib, Muawiyah Bin Abi Sufyan, Dan Muaz Bin Jabal ra. Poligami juga dilakukan oleh ahli fiqih tabi'in (generasi

<sup>69</sup> Ibnu hajjar al 'asqolani, *bulughul marom*, ( al kutubi: cet haromein), 217.

pasca sahabat nabi), dan lain-lain yang terbilang tidak banyak, Mereka mengakui orang yang menikah lebih dari satu istri.

Kesimpulannya bahwa generasi salaf (terdahulu) dan khalaf (kini) dari umat Islam yang telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal. Ada pendapat sangat minoritas yang disebutkan oleh Imam Qurthubi yaitu pendapat kaum Syi'ah dan sebagian madzab Zhahiri bahwa seorang muslim boleh menikah dengan sembilan perempuan sekaligus.<sup>70</sup>

Mereka memakai dalil dengan firman Allah:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

Bahwa ayat tersebut menjelaskan jumlah istri yang halal dinikahi yaitu dua, tiga, dan empat dengan menggunakan huruf *wawu* yang berfungsi membolehkan penjumlahan antara bilangan-bilangan tersebut (sembilan).

Al-Qurthubi juga menyatakan bahwa Mazhab Zhahiri bahkan membolehkan seorang laki-laki beristri delapan belas orang. Argumentasi mereka dari jamak *Matsnaa* (dua-dua) sama dengan empat, *tsulaatsa* (tiga-tiga) sama dengan enam, dan *ruba'* (empat-empat) sama dengan delapan, dan bila dijumlahkan menjadi delapan belas.

Kedua pendapat ini jelas salah dan tidak berdasarkan kaidah ilmiah sedikitpun, ia bertentangan dengan hadits-hadits yang membatasi hanya empat orang istri seperti perintah Rasul kepada orang-orang yang baru masuk Islam

<sup>70</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan., 29.

Al-Qanuji dalam bukunya Nail Al-Maram menjelaskan kekeliruan pemahaman mereka terhadap ayat tersebut:

Argumentasi mereka bahwa menikah dengan sembilan orang istri itu boleh dengan alasan bahwa huruf “*wawu*” berarti penjumlahan adalah bukti kebodohan terhadap bahasa Arab. Kalau seandainya Allah berfirman: “Nikahilah dua dan tiga dan empat orang” mungkin pendapat itu masih dapat diterima, tetapi redaksi ayat tidak demikian. Penggunaan huruf *wawu* (dan) di dalam ayat tersebut untuk menunjukkan kebolehan memilih antara dua istri, tiga istri dan empat istri. Jika digunakan *aw* (atau), terdapat kesan bahwa yang diperbolehkan hanyalah salah satu bilangan yang disebutkan (dua saja, atau tiga saja, atau empat saja). Padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh Al Qur’an.<sup>71</sup>

Sebenarnya yang disebutkan oleh Al-Qurthubi bukanlah pendapat umum kaum Syiah, ia hanya pendapat minoritas yang tidak dianggap di kalangan Syiah. Yang menjadi pendapat utama Syiah adalah kehalalan manikah dengan empat orang istri.

Menikah dengan sembilan istri hanya dikhususkan untuk Rasulullah saw seperti yang disebutkan oleh Aththusi (seorang ulama Syiah) dan Al-Mabsuth, dan bagi seorang budak hanya diperkenankan memiliki dua istri, Aththusi berkata: hanya diperkenankan menikah dengan empat orang wanita, sedangkan

[illegible]



### 3. Syarat-syarat poligami

Islam memang membolehkan berpoligami, namun Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami.

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- b. Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

<sup>72</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum diindonesia*, (Jakarta: tt), 226.

[illegible]

bersifat materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri-istri yang lain.<sup>74</sup>

pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut :<sup>75</sup>

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) ini huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya perlu mendapat penilaian hakim.<sup>76</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau susunan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
- b. Wanita dengan bibiny aatau kemenakannya.

<sup>74</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi.*,179.

<sup>75</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam., 24.

<sup>76</sup> Ibid., 87.



**DESKRIPSI KETENTUAN PP No. 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT 2**

**LARANGAN MENJADIKAN ISTRI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT**

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah setiap warga negara Republik Indonesia (R.I) yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, kemudian diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>76</sup>

a. Bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka beristri dariseoranh dan perceraian sejauh mungkin perlu untuk dihindarkan.

<sup>77</sup> Undang Undang Perkawinan R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Cet. 8, Bandung : Citra Umbara, 2017), 77.

1. Pegawai Negeri Terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam UU. No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian pasal 2 disebutkan ruang lingkup Pegawai Negeri yaitu sebagai berikut:





- Menurut ketentuan dari surat edaran Nomor: 48/SE/1990 yang diundangkan di Jakarta oleh Presiden RI Soeharto bersama Kabinetnya atau Sekretaris Negara pada tanggal 22 Desember 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN pada bagian III diatur tentang ASN Laki-Laki yang akan beristri lebih dari seorang terdapat pada ketentuan sebagai berikut:

- [illegible]

- Sedangkan berdasarkan pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 Jo. PP. No 10

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan/pejabat.

1. Permintaan izin sebagai mana pasal 3 dan 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki.
2. Setiap atasan menerima permintaan izin dari ASN dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, ataupun untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung dari mulai tanggal menerima permintaan yang dimaksud.<sup>78</sup>

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat

[illegible]

2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang Istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- c. Ada jaminan tertulis dari ASN yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

[illegible]

**wanita untuk menjadikan istri kedua ketia dan keempat**

Negeri Sipil pada Pasal 4 yang berbunyi:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Laki-Laki yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan/pejabat.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita tidak diizinkan untuk menikah dengan kedua ketiga dan keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Surat permintaan izin sebagaimana dalam ayat (3), harus dicantumkan

3. Permintaan izin sebagaimana dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

Sesuai dengan pasal diatas dijelaskan pada ayat 1 bahwa seorang pria yang bersetatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa memiliki istri dua hingga lebih dari itu, dengan syarat harus mendapatkan izin dari atasan, sedangkan wanita yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan menjadi istri kedua ketiga dan keempat (Poligami)



Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 diatur dalam bagian IV dan V surat edaran ini.<sup>80</sup>

- <sup>80</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 700.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melangsungkan perceraian dan ASN Laki-Laki yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:<sup>81</sup>

- <sup>81</sup>Ibid., 701.











Ketentuan dan pelaksanaannya dalam peraturan Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan

[illegible]

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan surat edaran ini.<sup>86</sup>

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak bisa diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>87</sup>

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran disiplin bisa berbentuk lisan maupun tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertentangan dengan norma etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelanggaran disiplin tidak hanya berlaku di dalam tugas jam kerja tetapi juga diluar tugas jam kerja.<sup>88</sup>

Adapun isi dari PP Nomor 53 Tahun 2010 atas perubahan PP No. 30 Tahun 1980 adalah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar kewajiban-kewajiban dan larangan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan perbuatan

<sup>86</sup> Ibid., 75.

<sup>87</sup> Ibid.,

<sup>88</sup> Frida Riani, *Larangan PNS Wanita untuk Menjadi Istri Poligami*,.50.

1. Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari, hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat :

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis;
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
3. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

c. Hukum disiplin berat

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan 35 hari kerja.

2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi ASN yang menduduki jabatan struktural atau

[illegible]



**ANALISIS KETENTUAN PASAL 4 AYAT 2 PP NO. 45 TAHUN 1990  
LARANGAN MENJADIKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
WANITA MENJADIKAN ISTRI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT  
PERPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu bersamaan.<sup>92</sup> Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini, yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gune berarti perempuan, sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki.<sup>93</sup> Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan

<sup>93</sup>Ibid., 352.





peria untuk menjadikan istri hal ini dikarenakan yang memiliki hubungan nasab atau susunan dengan istrinya:

1. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
2. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut juga berlaku, meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i* dan masih dalam masa *Iddah*.<sup>96</sup>

Adapun dasar hukum terkait tentang larangan menikahi seorang wanita Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S Al-Nisa' 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak wanitamu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara wanita ayahmu, saudara-saudara wanita ibumu, anak-anak wanita dari saudara laki-lakimu, anak-anak wanita dari saudara wanitamu, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara wanita yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak wanita dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan)

<sup>96</sup>*Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkala

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. Untuk bisa melaksanakan kewajiban itu, maka kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.<sup>97</sup>

<sup>97</sup> Undang Undang Perkawinan R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Cet. 8, Bandung : Citra Umbara, 2017), 77.

Mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aparatur negara, dan mempunyai tugas wajib tersendiri, sehingga sangat perlu mendapat perhatian karena menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) belum tentu menyelesaikan permasalahan. Di dalam ilmu hukum ada suatu hipotesa yang menyatakan bahwa semakin banyak penjatuhan sanksi-sanksi negatif bagi pelanggar hukum menunjukkan bahwa wibawa hukum merosot sehingga tidak efektif berlaku dalam masyarakat.<sup>99</sup>

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan diindonesia adalah Azas monogami, yaitu satu suami satu orang istri.

Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ketentuan tersebut terdapat pada PP No.10 Tahun 1983 tentang izin pernikahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil dari perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 1983 diubah pada

<sup>99</sup> Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind.Hill-co, 1985), 69.

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Laki-Laki yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama kedudukan sebagai istri kedua ketiga dan keempat dilarang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih seorang.

1. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama kedudukan sebagai istri kedua ketiga dan keempat dilarang menjadi pegawai negeri sipil.
2. Larangan menjadikan istri kedua ketiga dan keempat bagi ASN wanita.

[illegible]

Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri telah ditentukan bahwa: “Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.

<sup>101</sup>Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga. Dari pernyataan diatas sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur mengenai izin perkawinan dan perceraian pada PP RI Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1983, Buku UUP di Indonesia telah memuat hal-hal pokok yang dijadikan dasar untuk jalannya PP No. 45 Tahun 1990 diantaranya adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan (lembaran Negara tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran Negara nomor 3019).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran Negara nomor 3041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara tahun 1975 nomor 12, tambahan lembaran Negara nomor 3050).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara tahun 1975 nomor 26, tambahan lembaran Negara nomor 3058).



- an bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara ta  
bahan lembaran Negara nomor 3250)  
hal pokok yang dijadikan dasar untuk jalannya P  
kaitan dengan pasal 4 ayat 2 tentang tidak diizinkan  
kedua, ketiga atau keempat adalah point keenam  
plinan ASN, di mana apabila ASN wanita itu  
dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil N  
katkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) d  
n perceraian, memerlukan suatu penetapan Perat  
pernikahan dan perceraian bagi Aparatur Sipil  
g Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke

an bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara ta  
bahan lembaran Negara nomor 3250)  
hal pokok yang dijadikan dasar untuk jalannya P  
kaitan dengan pasal 4 ayat 2 tentang tidak diizinkan  
kedua, ketiga atau keempat adalah point keenam  
plinan ASN, di mana apabila ASN wanita itu  
dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil N  
katkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) d  
n perceraian, memerlukan suatu penetapan Perat  
pernikahan dan perceraian bagi Aparatur Sipil  
g Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menerangkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan keseimbangan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bemutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Aparatur Negara yang dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja.

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu, larangan menjadi istri kedua ketiga dan ketiga ataupun keempat, dan atau bermaksud melakukan perceraian, karena sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Menurut penulis sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sepantasnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal apa pun termasuk menjalankan urusan pemerintahan, karena setiap orang harus taat pada

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dilarangnya ASN wanita menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat adalah suatu bentuk kesetiaan atau ketaatan ASN kepada Pemerintah, karena Pemerintah merupakan Ulil Amri yang mengatur kesejahteraan rakyatnya yaitu ASN. Untuk memajukan kesejahteraan terhadap suatu negara apabila urusan itu adalah urusan kenegaraan maka urusan itu menjadi urusan keagamaan, karena memperjuangkan negara adalah hak yang diperintahkan oleh agama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang yang lebih membutuhkan penjelasan persoalan-persoalan kenegaraan. Pemerintahan sekarang sangat berkaitan erat dengan agama, karena negaralah yang menjadi penggerak utama dalam masyarakat, sedangkan tujuan adanya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.

[illegible]

ga yang kemungkinan besar akan timbul, sehingga mengganggu pelaksanaan kewajiban yang dikembangkan kepadanya sebagai abdi masyarakat.

**Analisis Hukum Islam Terhadap PP No.45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Mengenai Bagi ASN Wanita Untuk Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat Perspektif *Maslahah Mursalah***

Menurut ahli Usul Fiqh mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum yang tidak menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya

ga yang kemungkinan besar akan timbul, sehingga mengganggu pelaksanaan kewajiban yang dikembangkan kepadanya sebagai abdi masyarakat.

**Analisis Hukum Islam Terhadap PP No.45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Mengenai Bagi ASN Wanita Untuk Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat Perspektif *Maslahah Mursalah***

Menurut ahli Usul Fiqh mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya

ga yang kemungkinan besar akan timbul, sehingga mengganggu pelaksanaan kewajiban yang dikembangkan kepadanya sebagai abdi masyarakat.

**Analisis Hukum Islam Terhadap PP No.45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Mengenai Bagi ASN Wanita Untuk Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat Perspektif *Maslahah Mursalah***

Menurut ahli Usul Fiqh mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya

ga yang kemungkinan besar akan timbul, sehingga mengganggu pelaksanaan kewajiban yang dikembangkan kepadanya sebagai abdi masyarakat.

**Analisis Hukum Islam Terhadap PP No.45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Mengenai Bagi ASN Wanita Untuk Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat Perspektif *Maslahah Mursalah***

Menurut ahli Usul Fiqh mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya

ga yang kemungkinan besar akan timbul, sehingga mengganggu pelaksanaan kewajiban yang dikembangkan kepadanya sebagai abdi masyarakat.

**Analisis Hukum Islam Terhadap PP No.45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Mengenai Bagi ASN Wanita Untuk Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat Perspektif *Maslahah Mursalah***

Menurut ahli Usul Fiqh mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya

keseluruhan dengan intensitas permasalahan yang menyangkut kehidupan jangka menengah dan jangka panjang, misalnya dalam permasalahan poligami.

Dengan demikian poligami pula bisa menjadikan sumber konflik antara istri beserta anak-anaknya masing - masing. Karena itu hukum asal perkawinan adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan mengeluh dalam kehidupan yang monogamis, Hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur, terutama yang diatur dalam UUP dan peraturan pelaksanaannya serta kompilasi hukum Islam. Beberapa peraturan pelaksanaan yang terikat dengan poligami, seperti PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai aturan hukum yang mengatur sebagai tegas tentang perkawinan, perceraian, pembagian harta, dan tanggung jawab suami istri. Salah satu dampak yang berkaitan dengan poligami adalah masalah tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak yang masih dalam tanggungannya.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak

Beberapa ulama ahli ushul fiqh dalam menetapkan suatu hukum atau dalam menggali (*istinbat*) sebuah hukum tentu mempertimbangkan suatu alasan baik secara filosofis, sosiologis maupun efek dari pada status hukum pada masalah-masalah yang akan dipecahkan kasus hukumnya. Dengan berpegang teguh pada dalil-dalil *Nash qat'i* yaitu *Al-Quran* dan Hadist serta konsensus para ulama (*ijma'*) dan analogi, sehingga produk hukum yang akan dimunculkan ke permukaan ialah produk hukum yang kompatibel dan diakui validitasnya.

Salah satu teori fiqh yang dimaksud adalah *masalah mursalah*. Teori *masalah mursalah* ialah masalah yang tidak diakui secara pasti oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara pokok dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadikan teori ini bisa diterapkan untuk menggali sebuah hukum pada problematika saat ini.



Pada Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 melarang seorang wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi istri kedua, ketiga atau pun keempat, merupakan suatu hal baru. yang mana ketentuannya tidak ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, Namun dalam pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan Pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita ASN dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, karena dugaan kuat apabila wanita itu menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat akan mengalami beberapa masalah rumah tangga yang kompleks selain dengan suaminya juga dengan beberapa istri yang lainnya, yang bisa menyebabkan kewajiban sebagai abdi negara akan terganggu.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 melarang wanita untuk dijadikan istri kedua disebabkan berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami akan berpoligami (pasal 8 UUP), namun ada kesamaan prinsip antara kebijakan Pemerintah tersebut dengan UUP yaitu memperketat seseorang yang akan berpoligami. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam melarang seorang wanita untuk dijadikan istri kedua disebabkan berhubungan pertalian nasab, atau sesusuan dengan istrinya saudara kandung, seayah, atau seibu, serta keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya (sesuai pasal 41 KHI). Dalam KHI tidak ada larangan dalam hal akan melakukan poligami disebabkan oleh jabatan atau pekerjaan wanita, yang ada hanyalah hadis tentang pembatasan untuk melakukan poligami sesuai hadis berikut ini:

Dalil dari sunnah Rasulullah saw adalah hadits yang diriwayatkan oleh Qais

bin Al-Haris ra:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ص فَذَكَرْتُ

ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرْ مِنْهُمْ أَرْبَعًا. (ابن ماجه)

Dari Qais bin Al-Haris ra. beliau berkata: ketika masuk islam, saya memiliki delapan istri. Saya menemui rosulullah saw dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: pilih empat diantara mereka. (H.R. Ibnu Majah)”.

عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نشوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق ساعدهن أخبرنا مالك عن الزهري حديث غيلان

Hadits kedua riwayat Ghailan Bin Salamah Ats-Tsaqifi masuk islam dalam keadaan beristri sepuluhorang yang ia nikahi di masa jahiliyah(sebelum masuk Islam), mereka semua masuk Islam bersamanya, maka Rasulullah saw memerintahkannya untuk memilih empat diantara mereka.

Hadis di atas tentang percakapan antara Nabi kepada salah seorang Muallaf yang bernama Ghailan as Saqofi untuk menceraikan dan memilih empat diantara delapan istri yang di nikahi. Jumhur ulama menjadikan sebagai dalil atas haramnya poligami lebih dari empat orang, sedang Ulama Zhahiriyyah berpendapat, boleh poligami sampai sembilan orang. Jadi berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 tentang dilarangnya bagi ASN wanita untuk

Selain itu dalam Al-Quran juga membolehkan bepolidami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 3:

Argumentasi terkait ketentuan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan istri kedua ketiga dan keempat, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tentang poligami tidak ada satupun di dalam nas ataupun dalil yang mengandung larangan menjadikan istri kedua ketiga dan keempat, selama masa keterikatan dengan instansi maupun birokrasi, oleh karena itu fenomena larangan PNS wanita untuk dijadikan Istri Kedua Ketiga Dan Keempat akan penulis analisis dengan teori *masalah mursalah*.

Kebijakan Peraturan Pemerintah dalam penetapan PP No. 45 tahun 1990 tentang larangan Menjadikan istri Kedua Ketigas dan Keempat dapat dibenarkan menurut hukum islam jika sesuai dengan syarat-syarat *Maslahah Mersalah*.

Pertama, Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *masalah mursalah*. Sementara *masalah mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyyah.

Kedua, Hendaknya *masalah mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila masalah mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

[illegible]

Ketiga Hendaknya menggunakan *masalah mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya “Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit”.<sup>103</sup>

Dalam UU. No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian pasal 2 disebutkan ruang lingkup Pegawai Negeri yaitu sebagai berikut:

- <sup>103</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul.*, 130.



1. Pejabat Negara terdiri atas:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan
  - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
  - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri;
  - h. Kepala perwakilan Rakyat Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  - i. Gubernur dan Wakil Gubenur
  - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Kota; dan
  - k. Pejabat Negeri lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemaslahatan yang timbul dari penerapan kebijakan ini telah dirasakan oleh Aparatur Negara atasan maupun pegawai bawahan yang bersangkutan. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dengan adanya ketetapan pemerintah tentang larangan menjadikan istri kedua ketiga dan keempat menimbulkan sebuah kemaslahatan, terhindar dari perselisihan rumah tangga, sehingga bisa lebih fokus dan produktif saat menjalankan tugas negara.

Adapun teori *masalah mursalah* ketentuan PP No 45 tahun 1990 bisa dijadikan landasan hukum (hujjah). Alasan-alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Jika seandainya tidak menggunakan *masalah mursalah* maka tidak dapat

[illegible]

2. Hendaknya menggunakan *masalah mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya “Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit”<sup>105</sup>
3. Hendaknya *masalah mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *masalah mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.<sup>106</sup>
4. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, jika tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuhinya, di sini sangat diperlukannya teori *masalah mursalah* sebagai kehiijaannya.

Kebijakan pemerintah tentang larangan menjadikan istri kedua ketiga dan keempat dibuat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita, dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Penetapan hukum ini mengacu pada *masalah mursalah* karena tidak adanya dalil yang menerangkan dan kebijakan ini telah menimbulkan banyak kemaslahatan.

<sup>106</sup> Ibid.

hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

## PENUTUP

Setelah mengamati dan meneliti tentang Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Larangan Menjadikan istri Kedua Ketiga Dan Keempat, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

- 91





## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al- Fikih*, terjemah. Saefullah Ma'shum, Jakarta Pustaka Fordaus, 2008
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- As-Sanan, Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, diterjemahkan oleh. Ahmad Sahal Hasan Yordania: Daar An-Nafaais, 2002
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Faishal Haq, Ahmad. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* Surabaya: Citra Media, 1997.
- Gatot, Istomo, *Himpunan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Kepegawaian*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1982.
- Ghazali ,Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Himpunan Peraturan Perundang – Undangan, *Undang – Undang Perkawinan Indonesia*, Wacana Intelektual, Cetakan Pertama, 2009.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nawawi al jawi Muhammad, *Tafsirul Munir Juz 1*. Al haromain Jaya Indonesia
- Narbuko Cholid dan Ahmadi Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nurul, Muhamad, *Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim Gorontalo Dalam perkara perizinan bagi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa surat izin atasan*, Universitas Islam Negri Sunan Ampel, Surabaya 2012.
- Poerwardaminto, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka 1984
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1988.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

- Riani, Frida, *Larangan bagi PNS Wanita untuk Menjadi istri Poligami stadi analisis pasal 4 ayat 2 No.45 tahun 1990*, Institut Agama Islam Negri Walisongo, Semarang 2013.
- Shatibi al, Abi Ishaq. *Al-Muwafaqat Juz 2*. Mesir: Dar Al-Hadith, 2006.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih Bandung*: Pustaka Setia, 2007.
- Sayfuddin, Abi Hasan Al Amidi, *Al – Ahkam fiusul Al – ahkam, juz 3*, Riyad: Muassah Al-Halabi 1972.
- Sohari Tihami, Sahrani, *Fikh Munakahat: Kajian Fikh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet.V Surabaya Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkala.
- Wiratna, Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Wodi, Vannesia Jeanet, *Tinjauan Hukum Terhadap Pegawai Negri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ketiga / Keempat*, Universitas Hasannudin, Makasar 2014.